

Tugu Soekarno Palangka Raya: Pertentangan Antara Identitas Indonesia Dan Dayak

Heri Kusuma Tarupay¹

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya¹

E-mail: heritarupay@gmail.com

Keywords:	Abstract
<i>Monument, Soekarno, Indonesia, Dayak</i>	<i>Inaugural visit of President Soekarno to Palangka Raya on July 17, 1957, marked by the establishment of Tugu Soekarno, carries two meanings. The first meanings, from the perspective of the Indonesian government in Jakarta, is that this visit symbolizes the formalization of Central Kalimantan Province as one of the provinces in the unitary state of the Republic of Indonesia. The second meaning, from Dayak community's perspective, is that this visit is seen as a recognition of Dayak identity. These two meanings have been continuously debated over time since President Soekarno first visit, and Tugu Soekarno has become a symbol of this two-way communication. Using observation and document analysis methods, this writing examines the symbolic communication of Tugu Soekarno in Palangka Raya, which continues to symbolize the tug of war between Indonesia and the Dayak community</i>

Kata kunci:	Abstrak
<i>Tugu, Soekarno, Indonesia, Dayak</i>	<i>Kunjungan perdana Presiden Soekarno ke Palangka Raya tanggal 17 Juli 1957, yang lalu ditandai dengan pendirian Tugu Soekarno memiliki dua makna. Makna pertama, dari sisi pemerintah Republik Indonesia di Jakarta kunjungan ini merupakan peresmian Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna kedua dari sisi masyarakat Dayak, kunjungan ini dilihat sebagai pengakuan terhadap identitas Dayak. Kedua makna ini terus-menerus dipertentangkan dari masa ke masa sejak kunjungan pertama Soekarno tersebut dan Tugu Soekarno menjadi simbol komunikasi dua arah tersebut. Dengan menggunakan metode observasi dan penelusuran dokumen, tulisan ini mengkaji komunikasi simbolik Tugu Soekarno di Palangka Raya yang terus-menerus menjadi simbol tarik-menarik antara Indonesia dan Dayak.</i>

I. PENDAHULUAN

Benedict Anderson pernah menyarankan kepada para sarjana untuk memusatkan perhatian kepada salah satu tipe komunikasi politik di Indonesia yang disebutnya memiliki

ketidaksadaran sinekdoke (Anderson, 1990: 331-332). Sinekdoke yang dimaksudkan di sini yaitu tipe komunikasi politik yang mengambil suatu bagian untuk menggambarkan keseluruhan. Selain itu, Benedict Anderson juga memberikan saran lainnya yang masih berkaitan dengan komunikasi untuk memperhatikan modus komunikasi dan ekspresi politik yang jika dianalisis akan memunculkan konsepsi-konsepsi dari orang Indonesia mengenai politik mereka dengan agak berbeda. Dua model komunikasi politik yang disarankan oleh Benedict Anderson untuk diperhatikan oleh sarjana, untuk lebih ringkasnya diistilahkan “ucapan langsung” dan “ucapan simbolik”. Beberapa sarjana yang telah menganalisa model komunikasi dengan “ucapan langsung” cenderung tertarik karena isinya atau fakta historisnya dibandingkan karena tertarik pada bentuk dan artinya atau pemikiran politik yang ada di dalam “ucapan langsung” tersebut. Sementara model komunikasi “ucapan simbolik” luput diperhatikan karena tata bahasanya dianggap membingungkan menyangkut hubungan antara bentuk dan isi yang lebih menonjol dan sekaligus juga ambigu. “Ucapan simbolik” yang dimaksudkan Anderson di sini, bisa disaksikan pada monument atau upacara publik, kartun, film dan iklan. Monumen misalnya yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini, sifat ambiguinya bisa dilihat dari konteks politik ketika dibangun dan lalu juga pergeseran makna komunikasi yang berkembang dan bertentangan semasa pembangunan awal monument tersebut sampai dengan saat ini.

Kajian tentang tugu dan monumen telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti. Tugu dan monument yang dibuat dalam berbagai rupa dan bentuk bangunan dilihat oleh para peneliti sebagai ekspresi simbolik dari penguasa tertentu. Tugu dan monument dalam kajian yang lain dipandang sebagai simbol peristiwa tertentu dan lebih jauh mengalami pergeseran ingatan terhadap objek yang serupa (Arifin, 2014: 192, Churiah & Lukito, 2023: 94). Oleh karenanya, tugu dan monumen dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran sejarah lokal (Cahyo Setiaji & Hanif, 2018: 72). Dalam kajian lain yang tidak kalah menariknya, satu tugu dihancurkan karena dianggap sebagai simbol politik tertentu dan dibangun kembali dengan pergeseran makna yang berubah dari pembangunan awalnya (Sabri, 185, Lukman, 2020: 78–79, Kusno, 2023: 587–588). Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, dapat diambil benang merah bahwa masing-masing tugu dan monument membawa bahasa yang berbeda, mengalami pergeseran makna dari waktu-ke waktu dan hal tersebut menjadi ruang yang terbuka untuk dikaji.

Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Tengah, serupa dengan daerah-daerah lain di Indonesia, tidak luput untuk membangun monument sebagai ikon

kota. Sebagaimana telah dibahas oleh Anderson, bahwa pembangunan monument di berbagai tempat di Indonesia telah dilakukan sejak dari masa kekuasaan Soekarno dan dilanjutkan sampai dengan masa Orde Baru pimpinan Soeharto. Salah satu monument penting yang menjadi landmark kota di Palangka Raya adalah Tugu Soekarno. Tugu ini menjadi penting karena menjadi penanda kunjungan pertama Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 ke kota Palangka Raya. Kunjungan ini sekaligus juga menjadi legitimasi Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diresmikan tujuh tahun sebelum kunjungan Soekarno ke Palangka Raya tersebut. Palangka Raya lalu dijadikan sebagai ibukota dari provinsi Kalimantan Tengah yang baru dibentuk itu.

Pembangunan Tugu sebagai simbol kota merupakan fenomena populer dalam masyarakat (di) Indonesia. Sampai dengan saat ini pembangunan tugu terus-menerus dilakukan dalam banyak kepentingan. Tugu lama ikut-ikutan diperbaharui, dibangun kembali dan dibahasakan lagi oleh pengambil kebijakan dan masyarakat. Hal serupa dilakukan terhadap Tugu Soekarno di Palangka Raya, yang membuat upaya untuk mengungkap perubahan makna sejak Tugu Soekarno didirikan sampai dengan saat ini menjadi alasan kajian ini penting untuk dilakukan. Jika dikatakan di awal bahwa monument merupakan tipe pengucapan atau cara komunikasi politik kepada masyarakat kota, lalu pertanyaannya apa yang mau diucapkan atau dikomunikasikan Tugu Soekarno kepada masyarakat di Kota Palangka Raya? Sebagaimana diketahui, bahwa sampai dengan saat ini, Tugu Soekarno masih berdiri kokoh seperti bentuk aslinya ketika pertama kali dibangun, lalu bagaimana perkembangan komunikasi politik dalam konteks ketika pertama kali dibuat sampai dengan saat ini?

II. METODE

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ucapan dan komunikasi Tugu Soekarno terhadap masyarakat Kota Palangka Raya sejak awal didirikan sampai dengan saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada Tugu Soekarno. Fungsi Tugu Soekarno sebagai ruang terbuka, menjadi tempat masyarakat Kota Palangka Raya melakukan berbagai aktifitas, baik itu sosial, politik dan keagamaan yang penting untuk diamati sebagai bagian dari komunikasi simbolik. Pengamatan langsung telah dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini. Penelusuran literatur dilakukan dengan menelusuri media online seperti *Kalteng Today*, *Kalteng Online*, *Kalteng Terkini*, *Republika*,

Tempo dan surat kabar tercetak seperti *Palangka Raya Post* dan *Tabengan* yang memberitakan mengenai Tugu Soekarno. Surat kabar tercetak tersedia di Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara media online merupakan media nasional dan lokal yang dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet. Beberapa surat kabar online baik nasional maupun lokal memberitakan tentang perbaikan Tugu Soekarno pada tahun 2014. Selain itu, media online lokal tidak luput mengabarkan berbagai acara dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Palangka Raya di Tugu Soekarno. Untuk menjelaskan tentang konteks pendirian awal Tugu Soekarno, tulisan ini terutama menggunakan *Kronik Kalimantan* (T. Riwut, 2018). *Kronik Kalimantan* adalah buku perjalanan hidup Tjilik Riwut yang adalah Gubernur Kedua Kalimantan Tengah. *Kronik Kalimantan* disusun oleh Nila Riwut, putri dari Tjilik Riwut yang sumber utamanya adalah dokumen sejarah peninggalan Tjilik Riwut. Sumber sekunder lainnya dipergunakan terutama hasil penelitian mengenai Sejarah Kota Palangka Raya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugu Soekarno: Pembangunan Awal dan Konteks Politik

Tugu Soekarno dibangun sebagai tanda kunjungan perdana Presiden Soekarno ke kota Palangka Raya pada tanggal 17 Juli 1957. Soekarno yang adalah Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada waktu itu, mendarat di pinggir Sungai Kahayan tepatnya di kampung Pahandut, setelah melakukan perjalanan tiga hari dengan perahu dari Banjarmasin, ibukota Kalimantan Selatan. Sebagaimana sudah ditulis terlebih dahulu oleh Gerry van Klinken, bahwa Soekarno dan rombongannya telah mendapat sambutan yang sangat meriah dari para penduduk kampung di Kuala Kapuas dan sambutan yang sama diterima ketika pendaratan akhir dilakukan di kampung Pahandut (Bemmelen et al., 2011: 162). Tentu saja sambutan serupa seperti yang didapatkan di Pahandut ini sudah menjadi kebiasaan setiap kunjungan Soekarno ke berbagai tempat di Indonesia. Setidaknya popularitas itu diperoleh, karena Soekarno dianggap sebagai “penyambung lidah rakyat”. Antropolog James Siegel mengatakan bahwa Soekarno didengarkan oleh orang-orang yang merasa bahwa ia mengatakan apa yang dipikirkan oleh rakyatnya (Siegel, 2001: 19).



Gambar 1: Soekarno Menancapkan Tiang Pancang Tanda Kunjungan ke Palangka Raya
(Sumber: Koleksi Foto di Rumah Tjilik Riwut)

Konteks kunjungan Soekarno ke Palangka Raya bukan secara kebetulan dilakukan setelah tujuh tahun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataupun dua belas tahun setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak mengherankan kemudian, ketika Tugu Soekarno yang dibangun menandai kunjungan tersebut dibuat dalam desain yang bisa disaksikan sampai dengan saat ini. Tugu Soekarno berbentuk prasasti bertuliskan “17 Juli 1957 Pematjangan Tiang Pertama Kota = Palangkaraja = Ibukota-Propinsi Kalimantan Tengah Oleh : P.J.M. Presiden R.I. Dr. Ir. Soekarno”. Pada bagian bawah tulisan di prasasti tersebut dibuat tanda silang yang terdiri dari dua benda yaitu pedang dan tombak. Di bagian belakang prasasti tersebut, dibuat satu tiang pancang yang diujungnya berbentuk dua telapak tangan terbuka. Di bagian belakang prasasti dan tiang pancang tersebut, dibuat lagi tiang pancang berjumlah tujuh belas. Bagi siapapun yang melihat jumlah tiang pancang sebanyak tujuh belas tersebut bisa dimaknai sebagai tanggal ketika Proklamasi Kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, pada pagi hari di bulan Agustus tahun 1945. Tanggal ini juga bisa dimaknai sebagai tanggal pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilakukan pada upacara memperingati ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1950. Kemungkinan makna yang ketiga, bahwa tiang pancang berjumlah tujuh belas tersebut, merupakan tanggal ketika Soekarno tiba pertama kalinya di Palangka Raya, menandai tiang pertama Kota Palangka Raya,

sekaligus sebagai ibukota Propinsi baru Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertulis jelas di prasasti tersebut. Cara pandang terhadap angka 17 dimuat juga dalam “Lembaran Daerah Kalimantan Tengah Tahun 1969”. Dijelaskan seperti ini:

Angka 17 di Kalimantan Tengah seringkali mengakomodasi antara tanggal kemerdekaan dan tanggal kunjungan Soekarno pertama kalinya. Bandingkan dengan lambang kapas pada logo Kalimantan Tengah, disebutkan “Kapas berwarna putih adalah bahan sandang yang melambangkan kemakmuran Bangsa Indonesia pada umumnya dan rakyat Kalimantan Tengah pada khususnya. Jumlah kapas 17 bidji. Angka 17 merupakan angka yang keramat bagi rakyat Kalimantan Tengah, karena ketjuali tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945) juga merupakan tanggal peletakan batu pertama Pembangunan Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia, Bung Karno pada tanggal 17 Djuli 1957” (“Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 5/DPRD-GR/1965 tentang Lambang Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah” dalam Lembaran Daerah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Seri A, Np. 4, Tahun 1969).

Tiga makna yang bisa dibaca oleh siapapun yang melihat Tugu Soekarno tersebut, setidaknya menunjukkan tarik-menarik antara bahasa politik yang ingin disampaikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Soekarno dan pada sisi lain bahasa politik dari elit-elit Kalimantan Tengah yang menginginkan terbentuknya provinsi baru ini dan yang mendorong Soekarno mau datang ke tempat baru tersebut.

Tidak perlu menarik garis batas terlalu jauh untuk memahami konteks kunjungan Soekarno ke Palangka Raya dan komunikasi politik yang ingin disampaikan kepada masyarakat Palangka Raya lewat kunjungan tersebut. Cukuplah garis batas ditarik sampai tahun 1950 untuk melihat kondisi politik dalam negeri terutama kondisi di Jakarta dan hubungan dengan daerah –Kalimantan Tengah termasuk di dalamnya- serta melirik sedikit konteks luar negeri. Sekali lagi hubungan pusat dan daerah begitu penting dalam melihat komunikasi politik kunjungan Soekarno ke Palangka Raya terutama cara pandang pemerintah pusat dalam melihat kunjungan tersebut dan juga sebaliknya, kacamata yang jelas berbeda yang diinginkan oleh masyarakat Palangka Raya dalam peristiwa yang sama. Kedua-dua sudut pandang tersebut disimbolkan dengan Tugu Soekarno yang didirikan menandai kunjungan tersebut.

Telah diketahui bersama bahwa penataan politik di Indonesia baru dilakukan kembali pada tahun 1950. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan lima tahun sebelumnya, Indonesia memasuki periode kekacauan dalam masa yang sering disebut sebagai periode Revolusi (1946-1949). Perang dan perundingan berkecamuk yang akhirnya berakhir dengan diakuinya

Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara de facto maupun de jure. Tetapi, penataan pemerintahan dan politik setelah tahun 1950 tidaklah berjalan mudah, sampai-sampai sejarawan Merle Calvin Ricklefs menyebut periode ini merupakan kisah tentang kegagalan para pemimpin memenuhi harapan-harapan tinggi yang mengikuti keberhasilan mencapai kemerdekaan (Ricklefs, M.C., 2007: 471).

Sistem pemerintahan yang dipilih oleh para elit politik di Indonesia tahun 1950 untuk menjalankan roda pemerintahan adalah Demokrasi Parlemerter. Pemilihan sistem Parlemerter ini bukanlah hasil dari perdebatan politik, tetapi karena alasan bahwa sistem parlemerter adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang dipahami betul oleh elit-elit Indonesia. Di dalam Demokrasi Parlemerter tersebut partai-partai politik mendapatkan peran yang sangat besar. Soekarno pada sistem Demokrasi Parlemerter tersebut tetap menduduki posisi sebagai Presiden, namun jabatan tersebut hanyalah simbolis. Roda pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh Perdana Menteri. Dalam sistem pemerintahan seperti ini, Soekarno jelas tidak senang dengan posisinya. Salah satu hal yang mewarnai berjalannya sistem parlemerter ini adalah gonta-ganti Perdana Menteri dan oleh karenanya juga berdampak seringnya terjadi pergantian kabinet sebagai akibat pertentangan antara partai-partai politik yang eksis pada periode ini.

Perlu digarisbawahi bahwa kondisi politik yang terjadi di Jakarta antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1955 menarik untuk disampaikan, karena mempengaruhi tarik-menarik berkaitan dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 1957. Secara garis besar, beberapa peristiwa penting yang terjadi di Jakarta disampaikan dalam uraian ini sebelum melihat kondisi politik di Kalimantan Tengah sendiri. Telah dipahami bersama bahwa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan dan kebijakan pemerintah pusat di Jakarta telah mengecewakan beberapa pemimpin-pemimpin di daerah, terutamanya berkaitan dengan pemerataan keuangan dan pengaturan tentara. Darul Islam yang meletus di Jawa Barat semakin meluas ketika seorang tentara di Sulawesi Selatan Kahar Muzakkar yang tidak menyetujui kebijakan pembentukan tentara profesional menghimpun anggotanya untuk melawan pemerintah pusat. Kahar Muzakkar lalu menyatakan bergabung dengan Negara Islam Indonesia yang dirancang Kartosuwiryo di Jawa Barat dan melakukan perlawanan sampai tahun 1965. Pada periode tahun yang sama, kondisi dalam tubuh tentara juga mengalami perpecahan, yang puncaknya terjadi pada peristiwa 17 Oktober ketika sejumlah tentara menyerbu Istana. Peristiwa ini lalu menghasilkan hukuman skors bagi para pemimpin tinggi

Angkatan Darat, salah satunya Nasution. Skorsnya baru dipulihkan pada tahun 1955 dan dilanjutkan dengan penunjukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution setelahnya menjadi sekutu paling dekat dengan Soekarno, sekaligus bermusuhan dengan Partai Komunis Indonesia. Kedua-duanya memperebutkan pengaruh terhadap Soekarno. Partai Komunis Indonesia dalam rentan periode antara tahun 1950 sampai pemilihan umum tahun 1955 sedang menikmati kenaikan suara yang sangat besar. Ketika pemilihan umum pertama kali digelar di Indonesia pada tahun 1955, Partai Komunis Indonesia menempati posisi keempat.

Tentu saja pemilihan umum tahun 1955 merupakan titik pijak terpenting untuk melihat perkembangan politik di Indonesia. Keberhasilan Partai Nasional Indonesia (PNI) merebut kemenangan membuat posisi Soekarno semakin moncer. PNI dan Soekarno sekarang memiliki nilai tawar yang besar. Nasution, PNI dan Soekarno adalah satu kubu, berhadapan-hadapan dengan PNI, PKI dan Soekarno pada kubu yang lain. Pendekatan terhadap salah satu kubu adalah kunci untuk meraih dukungan terhadap tuntutan apapun yang diajukan pada periode tersebut. Ruang-ruang inilah yang dimanfaatkan oleh elit-elit di Kalimantan Tengah untuk membicarakan kembali pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Sama seperti kondisi di Jakarta, elit-elit di Kalimantan Tengah juga tidak berada dalam satu kelompok yang sama. Masing-masing menganggap bahwa jalur politik yang ditempuhnya akan memberikan keberhasilan terhadap posisinya ketika Provinsi Kalimantan Tengah disetujui untuk dibentuk.

Politik lokal di Kalimantan Tengah yang mengiringi pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1957 sama rumitnya dengan kondisi politik nasional di Jakarta. Untuk menjelaskan kerumitan politik lokal tersebut, perlu kiranya menelusuri ide tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Dicatat dalam Kronik Kalimantan yang disusun oleh Nila Riwut, putri Gubernur Kalimantan Tengah pertama Tjilik Riwut, bahwa ide tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah mulai muncul pada tahun 1952 (Riwut, 2018: 612). Lewat Kongres Serikat Dayak Kaharingan Indonesia dicatat aspirasi rakyat Kalimantan Tengah untuk memiliki rumah sendiri dan menjadi tuan di rumah sendiri. Hasil dari Kongres ini, lalu diteruskan ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tampaknya aspirasi untuk memiliki rumah sendiri dan menjadi tuan di rumah sendiri lalu disalurkan oleh beberapa perkumpulan ke berbagai tempat di Kalimantan Tengah. Di Bahu Palawa Kahayan Tengah, aspirasi ini disuarakan oleh tiga gerakan yang dinamai Gerakan Pembela Keadilan, Pasukan Sumpit Kanyawung dan Gerakan Mandau Telawang Pancasila (Riwut, 2018: 612–613). Gerakan yang disebut terakhir merupakan gerakan yang sangat vokal memperjuangkan

pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Tercatat, sepanjang tahun 1953, GMTPS melakukan berbagai perlawanan bersenjata di beberapa tempat di Kalimantan Tengah. Peristiwa yang paling terkenal tentu saja adalah penyerbuan terhadap tangsi polisi di Buntok yang dilakukan pada bulan November 1953. GMTPS baru menghentikan perlawanannya lewat Perdamaian Madara yang dilaksanakan di Barito Selatan. Jika melihat catatan dalam Kronik Kalimantan, tampaknya GMTPS menyetujui untuk menghentikan perlawanan karena adanya janji untuk memenuhi tuntutan masyarakat Kalimantan Tengah membentuk provinsi sendiri. Meskipun janji pemerintah pusat tersebut belum juga disetujui sampai dengan tahun 1955.

Selain GMTPS, pemain lain yang ikut serta menyuarakan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Tjilik Riwut. Berbeda dengan GMTPS, Tjilik Riwut berlatar belakang militer di korps Angkatan Udara. Pada tahun 1955, Tjilik Riwut menjabat sebagai Bupati Kotawaringin. Lewat surat bertanggal 23 Februari 1956 yang dikirim dari Sampit dan ditujukan ke Gubernur Provinsi Kalimantan di Banjarmasin, Tjilik Riwut mengirim resolusi dan surat-surat desakan serta mengabarkan bahwa tuntutan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah telah meluas sampai ke daerah-daerah pedalaman dan dikatakannya mendapat dukungan dari rakyat. Dalam surat yang lain, Tjilik Riwut lebih tegas lagi mengatakan untuk lebih mendengarkan suara-suara masyarakat pedalaman, sama seperti mendengarkan suara masyarakat perkotaan. Bahkan dalam tuntutan yang lebih keras lagi, Tjilik Riwut menyebutkan bahwa dirinya sangat memahami tradisi dan kebiasaan masyarakat sukunya, dan tradisi serta kebiasaan yang dimaksud akan berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tuntutan pembentukan provinsi Kalimantan Tengah tidak dipenuhi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksudkan oleh Tjilik Riwut dengan sesuatu yang tidak diinginkan jika tuntutannya tidak dipenuhi.

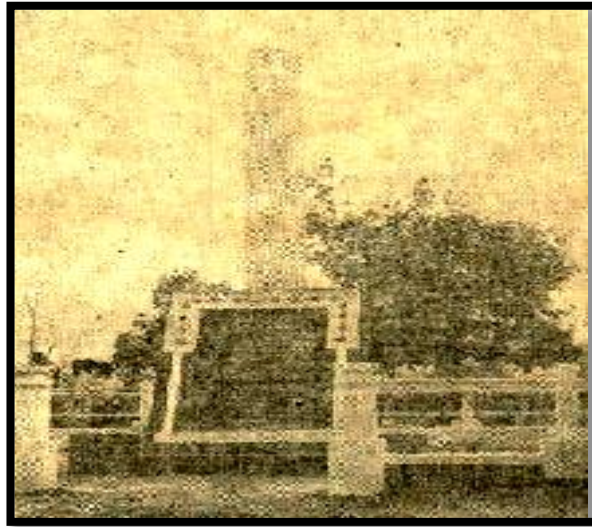
Pada titik inilah, GMTPS dan Tjilik Riwut membawa narasi yang sama. Meskipun tidak menjelaskan secara eksplisit maksud dari “sesuatu yang tidak diinginkan jika tuntutannya tidak dipenuhi” tetapi ancaman ini mengarah seperti gerakan yang telah dilakukan GMTPS sebelumnya. Gerakan ini serupa dengan pemberontakan di beberapa provinsi di luar Jakarta. Apa yang dilakukan oleh GMTPS dan Tjilik Riwut dalam upaya untuk mencapai tujuan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah ini dikatakan oleh Gerry van Klinken sebagai penggerak ideology ke-Dayak-an. Tuntutan ini dimanfaatkan oleh salah satu faksional di Jakarta yaitu militer untuk mengadakan semacam konspirasi dengan milisi Dayak di Kalimantan Tengah (Klinken & Hidayat, 2007: 211–212). Konspirasi ini menawarkan loyalitas

Dayak yang disenangi oleh militer pada satu sisi, dan militer menawarkan orang-orang Dayak sebagai pimpinan untuk provinsi yang akan dibentuk kemudian. Oleh karena itu, ketika pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah disetujui lewat Undang-Undang Darurat No. 10 tahun 1957, tanggal 23 Mei 1957, orang Dayak melihatnya sebagai milik orang Dayak, bukan milik Indonesia dan bukan pula milik orang Banjar yang merupakan provinsi lama. Keberhasilan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah ini juga semakin menunjukkan lemahnya negara disebabkan makin menguatnya faksionalisme di Jakarta, didukung oleh pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah luar Jakarta (Klinken & Hidayat, 2007: 211). Lalu, dalam pertarungan memperebutkan pengaruh di tingkat lokal, untuk memimpin Provinsi Kalimantan Tengah yang baru berdiri tersebut, militer memenuhi janjinya dengan memberikan jabatan gubernur kepada orang Dayak yaitu Tjilik Riwut. Akhirnya, tarik-ulur pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai titik akhir dengan disetujuinya pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi ketujuh belas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua puluh dua hari setelah terbitnya Undang-Undang Darurat No. 10 tahun 1957, Presiden Soekarno mengunjungi Pahandut sekaligus meresmikan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang baru dibentuk tersebut. Kunjungannya ditandai dengan pemasangan tiang pancang yang kelak menjadi tempat pendirian Tugu Soekarno. Dua cara pandang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, yaitu sudut pandang Indonesia dan Dayak masih menarik untuk diperbincangkan setelahnya.

Tugu Soekarno: Komunikasi Simbolik, Ide Soekarno dan Pembangunan

Kunjungan perdana sekaligus terakhir Soekarno ke Palangka Raya meninggalkan tiang pancang dalam bentuk sebatang kayu Ulin dan gagasan pembangunan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Masih bisa disaksikan di bekas kediaman Tjilik Riwut, foto Presiden Soekarno menancapkan Mandau pada sebatang kayu Ulin yang terpancang. Setahun setelah kunjungan Soekarno, tiang pancang tersebut diganti dengan Tugu Peringatan. Awalnya tugu peringatan tersebut berbentuk prasasti dengan tiang tembok pada bagian tengahnya. Tugu peringatan ini didirikan di pinggir Sungai Kahayan, menyaksikan kampung yang baru mulai akan dibangun. Tiga tahun tugu peringatan ini menyaksikan proses pembangunan, menyiapkan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang siap untuk dihuni oleh pemerintah. Tjilik Riwut yang ditunjuk menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah masih menjalankan roda pemerintahan dari Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Barulah pada Januari

1960, Tjilik Riwut pindah ke Palangka Raya untuk melanjutkan menata ibukota baru tersebut dan melanjutkan ide pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2: Tugu Soekarno yang Dibangun Tahun 1958
(Sumber: Hakim, 2003: 37)

Meskipun tidak secara nyata hadir di Palangka Raya untuk membangun ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi Soekarno memiliki campur tangan besar dalam proses pembangunan Palangka Raya. Soekarno memang memiliki harapan besar terhadap Kota Palangka Raya. Keinginannya untuk memindahkan ibukota dari Jakarta, ditujukan pada Kota Palangka Raya yang baru dibangun ini. Dalam program pembangunan yang dinamai “Pembangunan Khusus Palangka Raya” (PCPR), komando langsung berada di tangan Presiden Soekarno, dengan pelaksana teknis Tjilik Riwut Gubernur Kalimantan Tengah. Bentuk campur tangan yang besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan Kota Palangka Raya terlihat jelas dalam Musyawarah Pembangunan Kalimantan Tengah. Musyawarah ini dilaksanakan pada bulan November 1958, dan ditujukan sebagai persiapan akhir pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya. Hasil dari musyawarah ini adalah Piagam Palangka Raya yang dibacakan di depan beberapa menteri dari Jakarta, salah satunya Ir. H. Juanda, hadir juga Kepala Staf Angkatan Udara Laksamana R.S. Suryadarma. Para pejabat dari Jakarta (baca: pusat) menghadiri penutupan musyawarah ini. Musyawarah Palangka Raya ini lalu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembangunan beberapa gedung strategis. Patianom, dkk yang menulis buku *Sejarah Sosial Palangka Raya* (1992), mencatat bahwa para pegawai yang didatangkan untuk mulai bekerja di Provinsi yang baru setiap hari disuguhi pemandangan kesibukan

membuka hutan dan menggusur tanah. Suara traktor yang menumbangkan pepohonan adalah suara lain yang menjadi tanda pembangunan sedang berlangsung (Patianom, dkk., 64-65). Hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan dengan cepat terlihat dua sampai tiga tahun kemudian. Beberapa hasil pembangunan antara lain calon lokasi bandara, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Jawatan PU, Kantor Pengerahan Tenaga Rakyat, beberapa sekolah, jembatan, menara PDAM dan pasar (Hakim, 2003: 41–42). Yang menarik dari beberapa gedung tersebut, tentu saja adalah pembangunan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang bukan secara kebetulan didirikan berhadap-hadapan dengan Tugu Soekarno. Ketersediaan beberapa gedung hasil pembangunan awal inilah yang memungkinkan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah bisa dipindahkan pada akhir tahun 1959 dan awal tahun 1960 dari Banjarmasin ke Palangka Raya.

Tidak luput dari proses pembangunan, Tugu Soekarno turut serta dipercantik. Empat tahun setelah pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah ke Palangka Raya, puncak tiang pada Tugu Soekarno ditambahkan api sehingga membentuk seperti obor. Api merupakan lambang semangat yang tidak pernah padam. Api yang disimbolkan pada puncak tiang Tugu Soekarno adalah api yang diambil dari *Obor Pahewan* yang digunakan orang Dayak untuk membakar ladang dan mengambil madu (Hakim, 2003: 37). Sekali lagi pemugaran Tugu Soekarno mempertemukan antara identitas Indonesia dan identitas Dayak.

Tugu Soekarno dan Komunikasi Simbolik dengan Orde Baru

Ketika Gatot Amrih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah dari tanggal 23 Januari 1984 sampai dengan 21 Januari 1989, Tugu Soekarno kembali dirias. Gatot Amrih menambahkan 17 tiang di belakang prasasti dan tiang obor. Tujuh belas tiang yang ditambahkan di Tugu Soekarno tersebut merupakan simbol bambu runcing yang dianggap sebagai senjata rakyat Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Angka tujuh belas kembali dimunculkan sebagai bagian dari Tugu Soekarno. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa angka tujuh belas merupakan representasi dari banyak suara. Tujuh belas adalah tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, angka tujuh belas juga adalah tanggal kunjungan Presiden Soekarno ke Palangka Raya dan angka tujuh belas berkaitan dengan urutan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu provinsi ketujuh belas. Gatot Amrih kembali menambahkan makna dari 17 tiang di Tugu Soekarno sebagai simbol perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Makna yang diberikan

Gatot Amrih terhadap Tugu Soekarno bukanlah hal yang baru dalam politik Orde Baru. Pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto gemar menghubungkan periode kekuasaannya terutama doktrin penggunaan bambu runcing sebagai senjata yang digunakan dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah Orde Baru senang menggunakan istilah “perang mempertahankan kemerdekaan dibanding memakai istilah Revolusi untuk menunjukkan peran penting militer (McGregor, 2008: 55). Hubungan sejarah yang lain yang sering dijadikan doktrin Orde Baru adalah Peristiwa 30 September 1965, peristiwa yang menjadi batu loncatan Soeharto menjadi Presiden menggantikan Soekarno.



Gambar 3: Tugu Soekarno dengan Latar Belakang 17 Tiang

Konteks Provinsi Kalimantan Tengah pada masa Orde Baru menarik untuk diperhatikan terutama menguatnya peran negara dan kondisi sosial masyarakat di Kota Palangka Raya sebagai ruang didirikannya Tugu Soekarno. Douglas Kammen dan Gerry van Klinken menggambarkan dengan baik bagaimana menguatnya peran negara di Kalimantan Tengah. Kammen mengatakan bahwa setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno, dia menempatkan kolega politik dan militernya untuk melakukan the forestasi massal di Kalimantan Tengah (Kammen, 2021: 17–18). The forestasi yang dimaksudkan diperjelas dalam tulisan van Klinken dengan keterlibatan kolega politik dan militer Soeharto dalam industry kayu. Sebagaimana telah dipahami bersama, bahwa industry kayu merupakan industry terbesar yang ada di Kalimantan Tengah. Di luar negara, industry-industri kayu

terutama dikelola oleh orang Tionghoa. Kerabat Soeharto dan militer yang terlibat di dalamnya dikatakan van Klinken memperjelas antara negara formal dengan ekonomi gelap. Hubungan antara negara formal dan perusahaan inilah yang seringkali diistilahkan oleh beberapa peneliti sebagai “negara bayangan” (Klinken & Hidayat, 2007: 212). Kekuatan negara inilah yang melemah pada akhir periode Orde Baru.

Selain di industry kayu, negara juga turut campur tangan dalam pembentukan masyarakat di Kalimantan Tengah. Lewat program Transmigrasi, negara mengatur pemindahan masyarakat dari Jawa dan Bali ke daerah-daerah transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Cara pandang yang digunakan negara untuk membenarkan program transmigrasi ini adalah upaya untuk mengembangkan pertanian di daerah Kalimantan Tengah. Dalam cara pandang seperti ini, rezim Orde Baru menggunakan stereotip lama bahwa orang pribumi adalah orang-orang yang tertinggal yang perlu untuk dibimbing ke arah kemajuan.

Setelah melihat Provinsi Kalimantan Tengah secara luas dan menguatnya peran negara di masa Orde Baru, perlu untuk menarik lanskap yang lebih khusus yaitu kondisi di Palangka Raya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, kota yang dibangun karena dipilih menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, daya tarik sebagai ibukota provinsi menuntun orang-orang dari berbagai kelompok etnis datang dan menghuni kota ini. Pegawai Negeri yang diangkat atau dipindah tugaskan ke kota yang baru dibangun adalah salah satu warna dari penduduk yaitu etnis Dayak, selain warna lain seperti etnis Jawa dan Bali yang datang karena program transmigrasi, Etnis Banjar yang bergerak di bidang perdagangan bersama-sama dengan orang Madura. Tidak ada data sejarah yang menunjukkan adanya pergolakan antar etnis di Palangka Raya pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kota Palangka Raya ini ramah terhadap berbagai etnis yang mendiami Kota Palangka Raya. Peran negara yang besar dan kondisi sosial yang semakin beragam di Kota Palangka Raya menjadi konteks ketika Tugu Soekarno dipoles oleh Gubernur Gatot Amrih.

Tugu Soekarno: Komunikasi Simbolik Masa Kini

Lima puluh delapan tahun setelah kunjungan Soekarno ke Palangka Raya, Tugu Soekarno yang menjadi tanda kunjungan tersebut bersolek. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang meresmikan patung perunggu Soekarno yang didirikan di sebelah kanan dari Tugu Soekarno pada tanggal 1 Agustus 2015. Patung perunggu Soekarno tersebut dibuat oleh pengrajin di Yogyakarta dengan tinggi patung 6 meter. Patung perunggu

Soekarno tersebut dibuat dalam bentuk berdiri tegak dengan posisi tangan menunjuk ke Tugu Sukarno awal yang sudah dibuat sebelumnya. Surat kabar Tabengan melaporkan ucapan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Saya atas nama rakyat Kalteng merasa berbahagia, karena dari proses yang panjang, namun hari ini kita bisa meresmikan ini (patung Presiden Soekarno). Jadi, ini bukan hanya kehendak saya, namun ini sebagai perwujudnyataan dari tekad, semangat masyarakat Kalteng untuk menghormati Presiden pertama yang mencanangkan Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalteng.

Menarik untuk mencermati ucapan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut. Masih dalam laporan yang sama, Surat kabar Tabengan menjelaskan bahwa pembuatan patung perunggu Soekarno tersebut diinisiasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Tetapi rupanya, Gubernur Kalimantan Tengah tidak cukup berinisiatif, tetapi mengikut sertakan masyarakat sebagai inisiator pembangunan patung Perunggu tersebut. Tidaklah mengherankan model komunikasi politik seperti ini adalah model komunikasi politik pejabat Indonesia setelah Soekarno. Antropolog dari Universitas Cornell, James Siegel pernah menulis bahwa saat ini sulit menemukan rakyat yang merasa suaranya diwakilkan oleh pejabat. Yang banyak ditemui saat ini adalah pejabat yang menggunakan rakyat sebagai legitimasi. Dilanjutkan Siegel bahwa wakil rakyat terakhir yang dianggap rakyat menyuarakan apa yang diinginkan oleh rakyat adalah Soekarno.

Masih dalam konteks pembangunan patung perunggu Soekarno di Tugu Soekarno, Ketua Dewan Adat Dayak Sabran Achmad menyampaikan kritiknya terhadap pembuatan patung perunggu Soekarno tersebut (Palangka Raya Post, 3 Agustus 2015). Ada tiga kritik yang dilayangkan Sabran Achmad mengenai patung Soekarno tersebut. Pertama, mengenai bentuk patung yang dianggapnya tidak sesuai dengan sosok Soekarno yang disaksikannya ketika berkunjung ke Palangka Raya 58 tahun yang lalu. Sabran Achmad menarik jauh memorinya ke tahun 1957 dan menjelaskan bahwa tangan Soekarno selalu dalam keadaan terbuka dan dalam posisi berada di atas telinga. Tidak seperti yang ditunjukkan oleh patung perunggu tersebut. Kedua, Sabran Achmad mengkritik penggunaan motif Dayak yang dianggapnya menampilkan wajah melotot dan menonjolkan taring gigi. Dilanjutkannya bahwa ciri khas Dayak ada yang lebih religius, sederhana dan tidak menakutkan. Ketiga, Sabran Achmad memberi saran sebaiknya Tugu Soekarno tidak dibuka untuk umum, melainkan hanya dapat

diakses terbatas. Ada dua hal yang menarik untuk diperhatikan dari kritik yang dibangun oleh Sabran Achmad. Hal pertama bahwa Sabran Achmad masih membawa ingatan lama mengenai Tugu Soekarno yang berkaitan dengan cara pandang identitas Indonesia pada satu sisi dan perhatiannya pada identitas Dayak yang perlu untuk terus-menerus diperhatikan. Hal kedua berkait dengan saran yang diberikan untuk membatasi akses terhadap Tugu Soekarno. Memang tidaklah jelas diungkapkan siapa saja yang boleh diberi akses, dan siapa yang tidak boleh diberi akses terhadap Tugu Soekarno tersebut. Tetapi, fakta selama ini sejak dibangunnya Tugu Soekarno tersebut, kawasan ini menjadi ruang terbuka yang bebas diakses oleh masyarakat umum untuk kepentingan apapun. Pendapat Ahmad Sabran mengenai pembatasan akses terhadap Tugu Soekarno bukankah sebenarnya menunjukkan bahwa Tugu Soekarno adalah komunikasi pertentangan kelompok elit baik itu elit Jakarta maupun elit Dayak?



Gambar 4: Tugu Soekarno dan Patung Perunggu Soekarno

Sebagai penutup, perlu kiranya menyimak beberapa berita dari media online mengenai bagaimana Tugu Soekarno diingat dan dipergunakan saat sekarang. Pada tanggal 13 Mei 2023, Kalteng Today mengabarkan penggunaan Tugu Soekarno untuk titik deklarasi relawan Ganjar (Redaksi, 2023). Tiga hari sebelumnya, di lokasi yang sama, sejumlah ormas menggelar aksi damai terkait sikap Majelis Adat Dayak Nasional yang dinilai mengabaikan pernyataan oknum DAD DKI terkait pernyataan minum darah hewan sebagai bukti orang Dayak. Tanggal 17 Maret 2023, Kalteng Online memberitakan bahwa Tugu Soekarno akan segera bercahaya

(“Tugu Soekarno Segera Bercahaya,” 2023). Penataan Tugu Soekarno disampaikan juga oleh Media Nasional Republika tanggal 17 Juni 2023, yang memberitakan janji Gubernur Sugianto Sabran untuk melengkapi Tugu Soekarno dengan *Water Front City (Lestarkan Sejarah, Jembatan Kahayan dan Kawasan Tugu Soekarno Dilengkapi Water Front City*, 2023). Pada tanggal 10 Mei 2019, Kalteng Terkini memberitakan kunjungan Jokowi ke Tugu Soekarno (Kalteng Terkini, 2019). Di luar narasi formal yang diberitakan oleh media online, dalam beberapa kali kunjungan penulis ke Tugu Soekarno, masyarakat masih berlalu lalang berfoto bersama di Tugu Soekarno. Bukankah pemandangan seperti ini yang perlu terus dikomunikasikan?

IV.SIMPULAN

Pada waktu dibangun pertama kali di tahun 1957 sebagai tanda kunjungan Soekarno ke Kota Palangka Raya, Tugu Soekarno telah menjadi simbol komunikasi simbolik antara identitas Indonesia dan Dayak. Sejak itu, Tugu Soekarno menjadi simbol komunikasi elit mulai dari ide pembangunan yang dirancang Soekarno untuk memindahkan ibukota Negara Republik Indonesia, lalu Tugu Soekarno juga membahasakan menguatnya peran negara pada Masa Orde Baru yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kayu. Pada masa kini, Tugu Soekarno masih tetap berdiri kokoh, bahkan pengambil kebijakan di Provinsi Kalimantan Tengah menambahkan patung perunggu Soekarno di kompleks Tugu Soekarno. Sejak dibangun pertama kali sampai dengan saat ini, Tugu Soekarno selalu menjadi milik elit politik baik itu nasional maupun lokal untuk membahasakan berbagai kepentingan mereka. Masyarakat bukan elit, tidak tampak dalam model komunikasi simbolik seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saharuddin Zani Ahmad Sabri. (n.d.). 184 | *Proceedings Of The Third Seminar On National Resilience*.
- Anderson, B. R. O. (1990). *Kuasa-kata: Jelajah budaya-budaya politik di Indonesia*. Mata Bangsa.
- Arifin, T. S. (2014). Monumen Masa Pemerintahan Orde Lama Di Jakarta: Representasi Visual Nasionalisme Soekarno. *Panggung*, 24(2).
<https://doi.org/10.26742/panggung.v24i2.117>
- Bemmelen, S. van, Raben, R., & van Klinken, G. (Eds.). (2011). Mengkolonisasi Borneo: Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan. In *Antara daerah dan negara: Indonesia tahun 1950-an: Pembongkaran narasi besar integrasi bangsa* (Ed. 1). Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
- Cahyo Setiaji, N., & Hanif, M. (2018). Kajian Makna Simbolis Patung dan Monumen di Kabupaten Ponorogo Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 8(01), 59.
<https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.2069>
- Churiah, N., & Lukito, Y. N. (2023). Gedung Sarinah: Memori dan Kontinuitas Modernisme Kota Jakarta. *ARSITEKTURA*, 21(1), 83. <https://doi.org/10.20961/arst.v21i1.62033>
- Hakim, A. R. (2003). *Sejarah Kota Palangka Raya* ([Cet. 1.]). Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Kammen, D. (2021). Phantasmagoric Borneo. *Critical Asian Studies*, 53(2), 1–26.
<https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1884111>
- Kalteng Terkini, K. T. (2019, May 10). Jokowi Takjub Sejarah Tugu Soekarno. Kalteng Terkini. <https://kaltengterkini.co.id/2019/05/10/jokowi-takjub-sejarah-tugu-soekarno/>
- Klinken, G. A. van, & Hidayat, B. (2007). *Perang kota kecil: Kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kusno, A. (2023). Memory Network: Moving the Center/Revolutionalizing Culture. In S. M. G. Tambunan (Ed.), *Proceedings of the fourth Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities, Arts and Humanities Stream (AHS-APRISH 2019)* (Vol. 753, pp. 581–589). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-058-9_45
- Lestarian Sejarah, Jembatan Kahayan dan Kawasan Tugu Soekarno Dilengkapi Water Front City. (2023, June 17). *Republika Online*.
<https://republika.co.id/share/rwef60415>
- Lukman, A. (2020). Disonansi Memori Monumen Kolonial: Studi Kasus Tugu Cornelis Chastelein, Depok, Jawa Barat. *AMERTA*, 38(1), 77–92.
<https://doi.org/10.24832/amt.v38i1.77-92>
- McGregor, K. E. (2008). *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Syarikat.
- Redaksi. (2023, May 13). Tugu Soekarno Palangkaraya Sebagai Titik Deklarasi Relawan Ganjar. *Kalteng Today*. <https://kaltengtoday.com/tugu-soekarno-palangkaraya-sebagai-titik-deklarasi-relawan-ganjar/>
- Ricklefs, M.C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Cet. 1). In Pub.
- Riwut, T. (2018). *Kronik Kalimantan: Berdasarkan catatan pribadi dan dokument yang dikumpulkan oleh Tjilik Riwut* (N. Riwut, Ed.; Cetakan pertama). NR Publishing.

Siegel, J. T. (2001). Yang Hilang dari Zaman Bung Karno. *Basis*, 03–04, 18–19.

Tugu Soekarno Segera Bercahaya. (2023, March 16). KaltengOnline.com.
<https://kaltengonline.com/2023/03/17/tugu-soekarno-segera-bercahaya/>